

KPK Bakal Panggil Anggota DPR Penerima Fee Proyek e-KTP, Termasuk Ganjar

Category: Hukum, Olahraga
written by Redaksi | 21/03/2025



ORINews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi ([KPK](#)) akan memanggil sejumlah anggota DPR yang diduga menerima komitmen fee proyek e-KTP, termasuk mantan Wakil Ketua Komisi II, [Ganjar Pranowo](#).

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa sebelum pemanggilan dilakukan, pihaknya akan terlebih dahulu mendalami bukti dari hasil pemeriksaan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong (AN).

“Beberapa anggota legislatif kenapa belum diperiksa gitu kan ya. Justru kami sedang memanggil kembali saudara AN dan lainnya untuk mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan,” kata Asep kepada awak media, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

Asep meminta seluruh pihak bersabar menunggu kabar lebih lanjut terkait pemanggilan anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus ini.

“Tinggal ditunggu saja nanti kelanjutannya. Bukti-bukti dan keterangan yang ada tentu akan kita tindak lanjuti dari

Saudara AN,” ucapnya.

Sebelumnya, penyidik KPK telah mencecar Andi Narogong terkait komitmen fee dari Direktur Utama PT Sandipala Arthapura, Paulus Tannos, serta perusahaan konsorsium kepada anggota DPR dalam proyek e-KTP.

Konsorsium yang memenangkan lelang proyek e-KTP diketahui adalah Konsorsium PNRI, yang terdiri dari beberapa perusahaan, yaitu Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Arthapura.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap Andi Narogong menyoroti aliran dana dari Tannos dan konsorsium kepada anggota DPR.

“Hasil Riksa AA: Komitmen fee dari Tannos dan konsorsium ke anggota DPR,” kata Tessa kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

Namun, Tessa enggan mengungkapkan besaran fee yang diberikan Tannos dan pihak lainnya kepada anggota DPR. Ia juga tidak menyebutkan siapa saja anggota DPR yang menerima fee tersebut, dengan alasan bahwa substansi penyidikan bersifat rahasia dan biasanya baru diungkap dalam persidangan.

Sebelumnya, Andi Narogong telah menyelesaikan pemeriksaannya di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (19/3/2025) pukul 14.16 WIB. Namun, ia memilih bungkam saat ditanya awak media mengenai dugaan aliran dana e-KTP kepada Ganjar Pranowo, mantan anggota DPR Fraksi [PDIP](#).

“Pak Andi tahu keterlibatan aliran dana ke Ganjar Pranowo nggak?” tanya wartawan.

Dalam persidangan kasus e-KTP sebelumnya, mantan Ketua DPR Setya Novanto mengungkapkan bahwa Andi Narogong pernah melaporkan bahwa Ganjar Pranowo, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR, menerima uang sebesar 500

ribu dolar AS terkait proyek KTP elektronik.

“Waktu Andi (Narogong) ke rumah saya itu, menyampaikan telah memberikan bantuan dana untuk teman-teman di Komisi II dan Banggar (Badan Anggaran), dan untuk Pak Ganjar sekitar bulan September 500 ribu dolar AS. Itu disampaikan kepada saya,” kata Setya Novanto dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Novanto juga menyebutkan bahwa pertemuannya dengan Ganjar terjadi di Bandara Ngurah Rai, Bali, sekitar tahun 2011-2012. Dalam pertemuan tersebut, Novanto mengingatkan Ganjar dengan perkataan, “jangan galak-galak” dan “apakah sudah selesai” terkait proyek e-KTP yang tengah dibahas di Komisi II. [source:*inilah*]